

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN SEBULU
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)**

Alamat : Jalan. Pemuda No. 54 Sebulu Ilir
Sebulu, KUKAR , Kalimantan Timur 75552
Laman : <http://sebulu.kukarkab.go.id>
Pos-el : sebulu@mail.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kecamatan Sebulu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Sebulu disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebulu Tahun 2025 - 2029 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Sebulu Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Sebulu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sebulu, 20 Februari 2026

Camat Sebulu



Edy Fahrudin, SE., MM
Nip. 19761101 200112 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	2
a. Tugas Pokok Kecamatan	2
b. Fungsi Kecamatan	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	12
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	13
1.5 Sumber Daya Manusia	14
1.6 Uraian Singkat Organisasi	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	17
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	17
2.1.3 Strategi	18
2.1.4 Arah Kebijakan	18
2.1.5 Program	20
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	25
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	34
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024	37
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	44
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	47
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025	53
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Perbaikan Kedepan	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Table 1 - Jumlah Pegawai Kantor Camat Sebulu Berdasarkan Golongan	15
Table 2 - Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	18
Table 3 - Strategi dan Arah Kebijakan	19
Table 4 - Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025	20
Table 5 - Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2025	22
Table 6 - Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
Table 7 - Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Table 8 - Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sebulu	26
Table 9 - Rekapitulasi Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	27
Table 10 - Capaian Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban	30
Table 11 - Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	31
Table 12 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	36
Table 13 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain ...	42
Table 14 - Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis	44
Table 15 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Table 16 - Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	52
Table 17 - Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	59
Table 18 - Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	65
Table 19 - Monografi Kecamatan Sebulu Terhitung Juni 2025	76
Table 20 - Jarak Dari Desa Ke Kecamatan, Kabupaten, Propinsi	77
Table 21 - SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN SEBULU	78
Table 22 - ASET KECAMATAN SEBULU	81
Table 23 - CAPAIAN KINERJA PELAYANAN (PATEN) KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025	83
Table 24 - Rasio Pencapaian Target Kinerja	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Grafik Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	14
Gambar 2 - Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Sebulu	16
Gambar 3 - Grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	32
Gambar 4 - Grafik Perbandingan realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain.....	43
Gambar 5 - PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SEBULU	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan dan saling terkait antara tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebutkan :

Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

b. Fungsi Kecamatan

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraab kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan kecamatan;
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yangmenjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapatdilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan danpenanggulangan bencana;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

8. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
9. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa;
11. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
12. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian adalah:

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan

- informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem 'penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang / jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 9. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 10. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan :

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA,

- Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
 5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
 7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
 8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan; dan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

- penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
 10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
 12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
 13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
 14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat Seksi ketentramaan, keteriban umum dan perlindungan masyarakat (Tramtib) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan;
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi;
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu sertamembahayakan lingkungan hidup;
10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa

Seksi pemerdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan,
4. perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air;
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum; 10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
13. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;

5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagaipedoman pelaksanaan tugas;
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi

- dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 6. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
 7. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 8. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
 9. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 10. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
 11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
 12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
 13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
 14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) adalah memperhatikan isu – isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam jangka panjang.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebulu selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebulu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya aparatur Kecamatan dan Desa belum sesuai dibandingkan dengan beban tugas, luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Belum Optimalnya penggunaan Teknologi, peraturan pelaksanaan teknis yang belum jelas dan kurang koordinatif.
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
6. Masih Kurangnya Anggaran Rutin di Kecamatan dan Desa sehingga kurang maksimalnya kegiatan yang dilakukan.
7. Masih adanya kasus stunting di Kecamatan Sebulu Perlunya Pembinaan, Koordinasi serta anggaran yang Maksimal.
8. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sebulu dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
 - b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa.
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.

- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
- 4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah.
 - b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran.
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa.

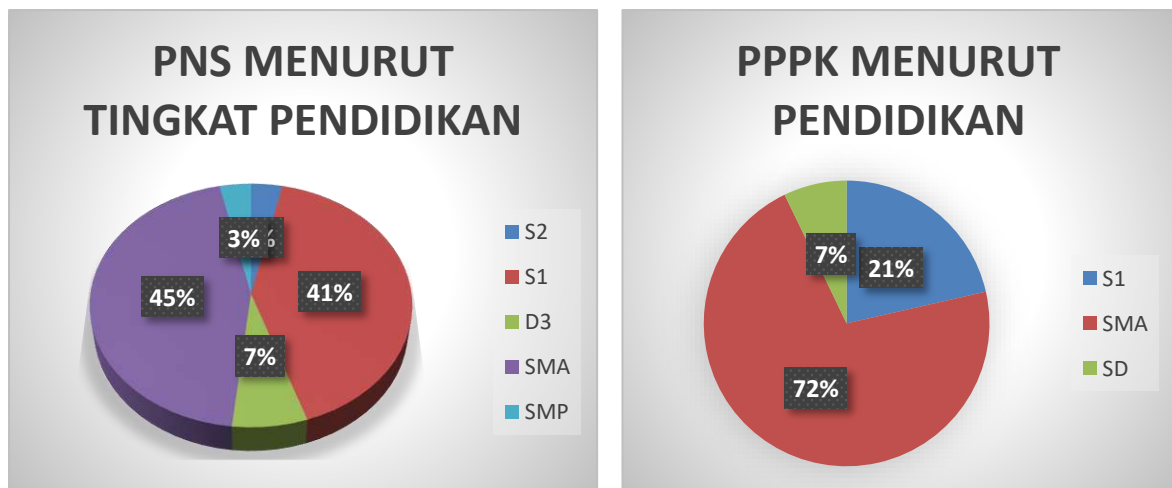
1.5 Sumber Daya Manusia

Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Melihat kenyataan seperti saat ini, perlu peningkatan sumber daya manusia khususnya ASN Kantor Camat Sebulu melalui kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, tugas belajar dan lain-lain.

Sehingga permasalahan maupun tantangan yang ada dapat diatasi serta mampu mengembangkan memanfaatkan potensipotensi yang ada di lingkungan Kecamatan .

Gambar 1

Grafik Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan:



Sumber Berdasarkan Seksi UMTAPEG bulan Januari 2026

Gambar 1 - Grafik Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Data Pegawai Kecamatan Sebulu terhitung Januari 2025 berjumlah 42 orang, terdiri dari 32 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang PPPK terdiri dari 13 Orang P3K Tahap 1 dan 2 serta 1 Orang Paruh Waktu. Sedangkan jumlah pegawai

berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Pegawai Kantor Camat Sebulu Berdasarkan Golongan

Pangkat Golongan				
GOLONGAN	Pangkat / Golongan	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
I/a	Juru Muda (PPPK)	1	0	1
I/b		0	0	0
I/c		0	0	0
I/d		0	0	0
Jumlah Gol. I		1	0	1
II/a	Pengatur Muda / II.a (PPPK)	4	6	10
II/b		0	0	0
II/c	Pengatur / II.c (PNS)	4	0	4
II/d	Pengatur Tk.I (PNS)	8	3	11
Jumlah Gol. II		16	9	25
III/a	Penata Muda/III.a (PNS + PPPK)	4	3	7
III/b	Penata Muda TK.I/ III.b (PNS)	4	1	5
III/c	Penata /III.c (PNS)	1	0	1
III/d	Penata Tk .1 (PNS)	3	2	5
Jumlah Gol. III		12	6	18
IV/a	Pembina /IV.a	1	0	1
IV/b	Pembina TK.I	1	0	1
IV/c		0	0	0
IV/d		0	0	0
IV/e		0	0	0
Jumlah Gol. IV		2	0	2
TOTAL		31	15	46

Sumber Data dari seksi Umum Tatalaksana dan Kepegawaian bulan Januari 2026

Table 1 - Jumlah Pegawai Kantor Camat Sebulu Berdasarkan Golongan

1.6 Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, membawahkan :
 - Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum;

Gambaran tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Sebulu



Sumber Data Perbup Kabupaten Kutai Kartanegara no 69 Tahun 20216

Gambar 2 - Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Sebulu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sebulu adalah Misi ke- 1 yaitu. **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.**

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1. Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindak lanjuti 2. Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Sumber dari RPJMD KUKAR

Table 2 - Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Kecamatan Sebulu untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Kecamatan Sebulu Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		3	Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
		4	Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		5	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Sumberr RPJMD KUKAR

Table 3 - Strategi dan Arah Kebijakan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	
	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Hasil Analisis

Table 4 - Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	39	Jumlah Keluhan Masyarakat yang diselesaikan oleh Kecamatan dibagi jumlah total keluhan masyarakat yang disampaikan ke kecamatan dikali 100
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	64	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus trantibun di Kecamatan
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	45	
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.30 (Baik)	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	3	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan/Rumus Perhitungan
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	Inovasi Perangkat Daerah
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	Nilai SAKIP Kabupaten
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	Indeks RB Kabupaten

Table 5 - Perjanjian Kinerja Kecamatan Sebulu Tahun 2025

Tabel 6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026
1	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	30	39	40
2	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	60	64	65

No	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026
3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	27.57	45	45
4	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	NA	100	NA
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	NA	88.30 (Baik)	NA
	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	NA	100	NA
6	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Level	NA	3	NA
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	NA	1	NA
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	NA	100	NA
8	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	NA	100	NA
9	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	NA	48	NA
10	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	NA	77	NA
11	Indeks RB Kabupaten	Nilai	NA	65	NA

Table 6 - Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sebulu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Table 7 - Skala Nilai Peringkat Kinerja

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja keseluruhan Kecamatan Sebulu tahun 2025 sebesar 99.38%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sebulu
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	39	39	100.00	Sangat Tinggi
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	64	64	100.00	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	45	45	100.00	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88.30 (baik)	87.75	99.38	Sangat Tinggi
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tahun sebelumnya					
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3	3	100.00	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100.00	Sangat Tinggi
7	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100.00	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48	48	100.00	Sangat Tinggi
10	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77	65.92	82.61	Tinggi
11	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	71.51	110.02	Sangat Tinggi
	CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			830.30	824.18	99.38	Sangat Tinggi

Hasil Analisis

Table 8 - Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sebulu

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja ke-1** (Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di Tindak Lanjuti) Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2025 sebesar 39% dan realisasinya 39 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Adapun Faktor pendukung capaian kinerja 100 % Dukungan pimpinan didorong oleh kesesuaian program dengan visi misi daerah, manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan data pendukung yang kuat, serta potensi keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan Target Kinerja tercapai karena keluhan masyarakat dapat ditangani dan diberikan arahan sebagaimana

mestinya. Rekapitulasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 9
Rekapitulasi Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

NO	UNIT KERJA	JUMLAH KELUHAN	TINDAK LANJUT	PERSentase REALISASI TAHUNAN	Uraian Keluhan	Tindak Lanjut
1	SEKSI PEMERINTAHAN	13	13	100%	Sengketa Batas Tanah dan Penutupan Jalan	Dari total 13 keluhan terkait sengketa batas tanah dan penutupan jalan, sebanyak 13 keluhan telah ditindaklanjuti.
2	SEKSI KESOS	4	4	100%	Pelayanan Lambat, tidak tepat waktu, persyaratan dan Sarana dan Prasarana (AK1 dan SKTM)	Perbaikan pelayanan dilakukan melalui inovasi PECUT (Pelayanan Cepat Tunggu di Tempat), yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan secara langsung dan cepat di desa masing-masing tanpa harus datang ke kantor Kecamatan
3	SEKSI PELUM	4	4	100%	Pengelolaan Sampah, Lampu Penerangan Jalan mati	Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat 4 (empat) keluhan masyarakat terkait sampah rumah tangga yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Selain itu, terdapat 1 (satu) keluhan lainnya terkait LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) dalam kondisi padam dan dinyatakan selesai.
4	SEKSI TRAMTIB	1	1	100%	Teguran Video Viral di Acara HUT Desa Selerong Tahun 2025	Mediasi melakukan pertemuan tertutup antara pihak yang ditegur dan yang menegur serta melibatkan tokoh masyarakat atau BPD sebagai penengah. Dan Membuat berita acara hasil mediasi.
JUMLAH		22	22			
PERSentase CAPAIAN KINERJA TAHUNAN				100%		

Sumber Data dari Seksi Pelayanan Umum Hasil analisis

Table 9 - Rekapitulasi Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja ke-1 (Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum) Target Kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2025 sebesar 64 % dan Realisasi 64 % atau Capaian Kinerja sebesar 100 %. Target Kinerja tercapai karena adanya dukung pihak internal yaitu Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Persentase capaian ketentraman dan ketertiban tercapai karena jumlah kasus yang ditangani sesuai dengan total kasus yang ada di kecamatan tidak ada kejadian ketentraman dan ketertiban yang menimbulkan masalah besar dan kejadian ketentraman dan ketertiban bisa ditangani oleh bagian Ketentraman dan Ketertiban. Tabel presentase capaian kinerja ketentraman dan ketertiban sebagai berikut :

Tabel 10
Capaian Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban

No.	Nama Desa (Jumlah Permasalahan)	Lokasi	Pihak Terlibat	Jenis Permasalahan	Koordinasi	Tindak Lanjut
1.	Desa Sebulu Ilir (0 Permasalahan di Tahun 2025)					
2.	Desa Sebulu Ulu (2 Permasalahan di Tahun 2025)	Jln. Meranti RT.IX Desa Sebulu Ulu	Polsek dan Trantib Kecamatan sebulu	ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dalam kondisi agresif sulit di arahkan atau beresiko melukai diri sendiri / orang lain	Meminta surat rujukan atau rekomendasi dari puskesmas untuk ditindaklanjuti ke rumah umum Atma Husada Mahakam Samarinda	Mengantar ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) ke rumah sakit umum Atma husada mahakam Samarinda
		Desa Sebulu Ulu	Pemerintah Desa Sebulu Ulu,Pemerintah Kecamatan Sebulu,Polsek dan Puskesmas	Keracunan Massal	Pemerintah Kecamatan Sebulu,Pemerintah Desa Sebulu Ulu,Polsek dan Puskesmas	Pemerintah Kecamatan Sebulu melakukan koordinasi koordinasi kepada pemerintah desa sebulu ulu terkait keracunan massal yang terjadi
3.	Desa Sebulu Modern (1 Permasalahan di Tahun 2025)	Sebulu Modern	Pemerintah Desa Sebulu Modern, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Musibah Bencana Kebakaran	Pemerintah Desa Sebulu Modern, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Melakukan koordinasi dan mendata berapa jumlah korban bencana kebakaran yang terjadi di Desa Sebulu Modern
4.	Desa Beloro (0 Permasalahan di Tahun 2025)					

No.	Nama Desa (Jumlah Permasalahan)	Lokasi	Pihak Terlibat	Jenis Permasalahan	Koordinasi	Tindak Lanjut
5.	Desa Tanjung Harapan (0 Permasalahan di Tahun 2025)					
6.	Desa Sanggulan (1 Permasalahan di Tahun 2025)	RT.X Desa Sanggulan	Polsek,Desa dan Trantib Kecamatan Sebulu,BPBD dan Masyarakat	Terjadinya Musibah anak tenggelam di sungai mahakam	Polsek,Desa dan Trantib Kecamatan,BPBD	Diadakannya pencarian oleh pihak BPBD,Desa,Kecamatan dan Pihak Polsek
7.	Desa Senoni (0 Permasalahan di Tahun 2025)					
8.	Desa Selerong (2 Permasalahan di Tahun 2025)	Desa Selerong	Pemerintah Desa Selerong, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Musibah Bencana Kebakaran	Pemerintah Desa Selerong, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Melakukan koordinasi dan mendata berapa jumlah korban bencana kebakaran yang terjadi di Desa Selerong
		Desa Selerong	Polsek,Desa dan Trantib Kecamatan Sebulu,BPBD dan Masyarakat	Terjadinya Musibah anak tenggelam di sungai mahakam di Desa Selerong	Polsek,Desa dan Trantib Kecamatan,BPBD	Diadakannya pencarian oleh pihak BPBD,Desa,Kecamatan dan Pihak Polsek
9.	Desa Lekaq Kidau (0 Permasalahan di Tahun 2025)					
10.	Desa Segihan (0 Permasalahan di Tahun 2025)					

No.	Nama Desa (Jumlah Permasalahan)	Lokasi	Pihak Terlibat	Jenis Permasalahan	Koordinasi	Tindak Lanjut
11.	Desa Giri Agung (1 Permasalahan di Tahun 2025)	Jln.Poros Samarinda-Muara Kaman Km.52	Pemerintah desa giri agung dan Trantib Kecamatan Sebulu	Sengketa lahan oleh ahli waris Aji Ruslani	Polsek Desa dan Trantib Kecamatan Sebulu	Diadakan Mediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa
12.	Desa Sumber Sari (1 Permasalahan di Tahun 2025)	Desa Sumber Sari	Pemerintah Desa Sumber Sari, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Musibah Bencana Kebakaran	Pemerintah Desa Sumber Sari, Polsek,Koramil dan Kecamatan Sebulu	Melakukan koordinasi dan mendata berapa jumlah korban bencana kebakaran yang terjadi di Desa sumber sari
13.	Desa Mekar Jaya (1 Permasalahan di Tahun 2025)	Desa Mekar Jaya	Polsek,Trantib Kecamatan sebulu dan Puskesmas	ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) dalam kondisi agresif sulit di arahkan atau beresiko melukai diri sendiri / orang lain	Meminta surat rujukan atau rekomendasi dari puskesmas untuk ditindaklanjuti ke rumah umum Atma Husada Mahakam Samarinda	Mengantar ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) ke rumah sakit umum Atma Husada Mahakam Samarinda
14.	Desa Manunggal (0 Permasalahan di Tahun 2025)Daya					
Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum		9/9x100% = 100		Persen	Jumlah Kasus dibagi Jumlah Kasus yang ditangani dikali 100%	

Sumber Data dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum hasil Analisis
Table 10 - Capaian Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban

Indikator Kinerja ke-1 (Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa) Target Kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2025 sebesar 45 % dan Realisasi 45 % atau capaian kinerja sebesar 100%, Adapun salah satu Faktor pendukung Pihak Eksternal dan anggaran yaitu Kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha desa, Keberlanjutan anggaran yang menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha desa. Terjadi peningkatan berdasarkan

Tabel 11
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

No	Nama Desa	PA Desa 2023	PA Desa 2024	PA Desa 2025	Persentase (%)
1	BELORO	1.800.000			
2	GIRI AGUNG	4.500.000	11.009.372	10.700.250	
3	LEKAQ KIDAU				
4	MANUNGGAL DAYA		20.000.000	10.000.000	
5	MEKAR JAYA				
6	SANGGULAN			6.800.000	
7	SEBULU ILIR				
8	SEBULU MODERN			3.400.000	
9	SEBULU ULU				
10	SEGIHAN	6.273.000	2.782.000	10.123.000	
11	SELERONG				
12	SENON				
13	SUMBER SARI	10.000.000			
14	TANJUNG HARAPAN			10.897.000	
	Presentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa =(Nilai Total PADes Tahun Berjalan (N) dikurang nilai Total PADes Tahun Sebelumnya (n-)) dibagi Nilai Total PADes Tahun		33.791.372	51.920.250	53,65

Sumber Data dari bidang PMD hasil Analisis
Table 11 - Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

hasil perhitungan persentase PADes menjadi 53,65% dari target 45%, Adapun Grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Desa sebagai berikut .

GAMBAR 3



Gambar 3 - Grafik pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

- 2) **Indikator Kinerja ke-2** (Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-2” tahun 2025 sebesar 100%, dengan Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 3) **Indikator Kinerja ke-3** (IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-3” tahun 2025 sebesar 88.30 (baik) Poin Realisasi 87.75 poin Capaian Kinerja 99.38% dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Faktor Pendukung yaitu Kemudahan persyaratan, Prosedur pelayanan, Kecepatan pelayanan, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Kualitas Sarana dan Prasarana. Faktor Penghambat Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengisi IKM secara Digital, Kurangnya Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public, Kurangnya Kompetensi/kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan, Kurangnya pemahaman tentang IKM Secara Digital sehingga masyarakat mengabaikan pengisian IKM
- 4) **Indikator Kinerja ke-4** (Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-4” tahun 2025 sebesar 100%, dengan Realisasi 100%, Capaian Kinerja 100%,

dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Segera Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- 5) **Indikator Kinerja ke-5** (Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-5” tahun 2025 level 3 Realisasi level 3 Capaian Kinerja 100%. Kriteria Penilaian Sangat Tinggi.
- 6) **Indikator Kinerja ke-6** (Jumlah Inovasi Perangkat Daerah) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-6” tahun 2025 yaitu 1 Inovasi Realisasi 1 Inovasi Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, Perangkat daerah sudah menyampaikan inovasi diharapkan kedepannya inovasi lebih baik lagi.
- 7) **Indikator Kinerja ke-7** (Tindak Lanjut Pengajuan SP4N Lapor) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-7” tahun 2025 sebesar 100% dengan Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, segera melakukan Tindak lanjut pengaduan SP4N Laporan dan melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi.
- 8) **Indikator Kinerja ke-8** (Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-8” tahun 2025 sebesar 100% dengan Realisasi 100% Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, Keterinputan data pada Satu data Indonesia 100% sesuai dengan keterisian data pada Aplikasi BECIK dan e Walidata.
- 9) **Indikator Kinerja ke-9** (Jumlah Laporan Pelaksanaan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-9” Tahun 2025 sebesar 48 Laporan dengan Realisasi 48 Laporan Capaian Kinerja 100%, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi, sesuai dengan laporan seksi Kesejahteraan Sosial pelaksanaan kegiatan Gerakan Etam Mengaji setiap 2 kali dalam setiap bulannya yang dituang dalam laporan dan dokumentasi kegiatan.
- 10) **Indikator Kinerja ke-10** (Nilai SAKIP Kabupaten) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-10” tahun 2025 sebesar 77 Nilai Realisasi 65.92 Nilai Capaian Kinerja 85.61 Nilai, dengan Kriteria Penilaian Tinggi. Penilaian ini Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 3 Septemberr 2024 nomor : B/417/AA.05/2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukan bahwa nilai sebesar 65.92 dengan predikat “B” hal tersebut

menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “BAIK”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan Sebagian unit kerja utama, namun perlu adanya Upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

11) Indikator Kinerja ke-11 (Indeks RB Kabupaten) Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-11” tahun 2025 sebesar 65 Nilai Realisasi 71.51 Nilai Capaian Kinerja 110.02 Nilai, dengan Kriteria Penilaian Sangat Tinggi. Penilaian ini Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 25 April 2025 nomor : B/282/RB.06/2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Indeks RB Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 71.51 dengan kategori “BB”.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Persentase realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 99.38 %, sedangkan persentase realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar 100.90 %, perbandingan persentase capaian kinerja 98.49%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci dalam tabel di bawah ini

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			% Capaian
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9=8/7x100	10
Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	37	100	270.27	39	39	100.00	37
	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	63	100	158.73	64	64	100.00	63
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	40	41	102.50	45	45	100.00	97.56
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	100
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	100	100	100.00	88.3	87.75	99.38	99.38
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	100
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	level	100	100	100.00	3	3	100.00	100
Meningkatnya Partisipasi Perangkat	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1	100.00	1	1	100.00	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			% Capaian
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9=8/7x100	10
Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah									
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesiia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100	100.00	100	100	100.00	100
Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	48	48	100.00	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	73	70.1	90.30	77	65.92	85.61	94.81
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	64	60.12	93.94	65	71.51	110.02	117.12
TOTAL PERSENTASE KINERJA			3.341.14	3,371.05	100.90	830.30	825.18	99.38	98.49

Hasil Anllisis

Table 12 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja kecamatan sebulu dengan kecamatan Kembang Janggut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	37	100	270,27	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	63	100	158,73	Sangat Tinggi	80	100	125	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	40	41	102,50	Sangat Tinggi	10	25,40	254	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 100% per 31 31 Maret setiap tahun	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	84,85	84,85	Tinggi
3	Mewujudkan tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan pada aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
5	Terlaksananya Kepatuhan Input ePantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	50	50,00	Rendah	100	0	0	Sangat Rendah
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	75	75,00	Sedang	100	100	100	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan	Persen	100	90	90,00	Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
	Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Juni dan Semester II akhir bulan oktober setiap tahun									
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir:	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	1	1	100	Sangat Tinggi
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
14	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	94,61	135,16	Sangat Tinggi	70	90,76	129,66	Sangat Tinggi
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
18	Maturitas Sistem Pengendalian	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Level 3	3,94	100	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
	Intern Pemerintah (SPIP)										
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100	72,98	72,98	Sedang	Baik (B) 60-70	66,27	100	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	64,64	64,64	Rendah	74	76,84	103,84	Sangat Tinggi
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	0	0	Sangat Rendah
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	59,00	78,67	Tinggi	75	57,11	76,15	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
25	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	1	100	Sangat Tinggi
26	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14	15,73	112,36	Sangat Tinggi	14	19,69	59,36	Rendah
27	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan penganggaran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
28	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
29	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	40	100,00	Sangat Tinggi	40	90,16	225,40	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
30	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,1135	86,49	Tinggi	3,6	3,1135	86,49	Tinggi
31	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	70.1	90,30	Tinggi	73	70.1	90,30137	Sangat Tinggi
32	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,94	Sangat Tinggi	64	60,12	93,94	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,59	58,59	118,15	Sangat Tinggi	49,57	58,59	118,20	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	4,35	48,60	Sangat Rendah	8,95	8,70	97,21	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	94,46	100,00	Sangat Tinggi	Zona Hijau	Zona Hijau	100	Sangat Tinggi
36	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	100	100	100	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100,00	Sangat Tinggi	70	90,42	129,17	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	73,59	73,59	Sedang	73,81	73,59	99,70	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kec. Sebulu					Kec. Kembang Janggut			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Kriteria Penilaian
39	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100,77	100,77	Sangat Tinggi	100	119,75	119,75	Sangat Tinggi
40	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	1	100	Sangat Tinggi
41	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	Surat Keputusan	1	1	100,00	Sangat Tinggi	1	1	100	Sangat Tinggi
	CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			3.341.14	3,371.05	100.90	Sangat Tinggi			99,88	Sangat Tinggi

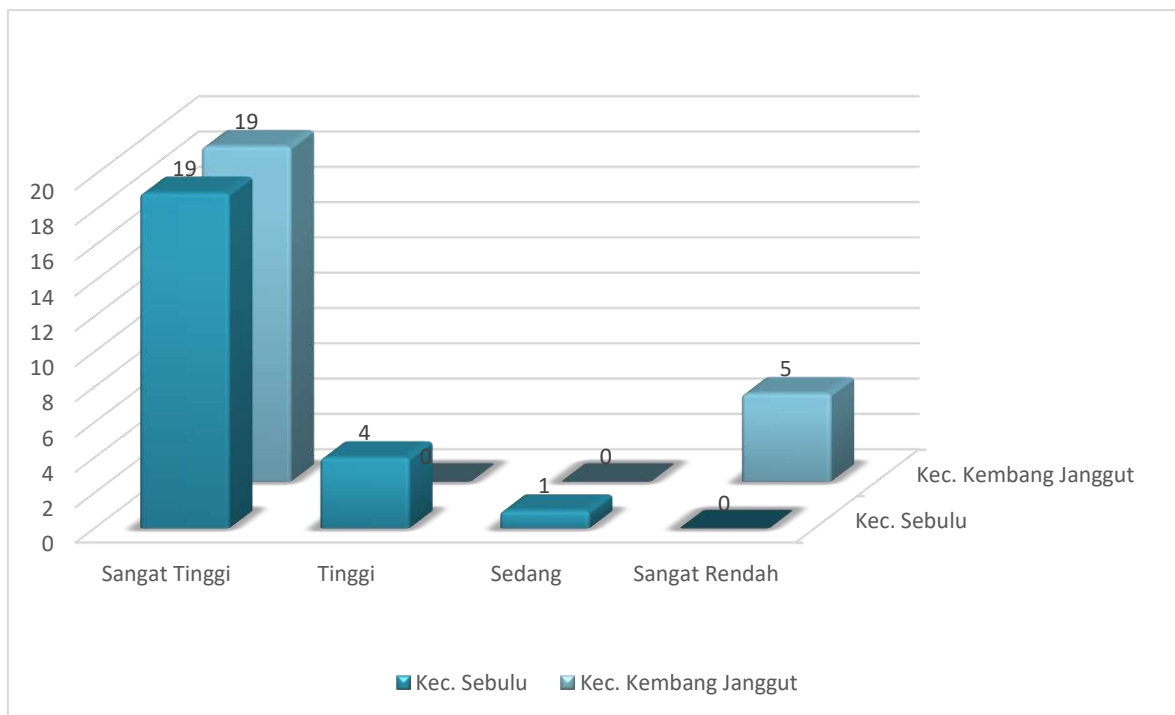
Sumber Data : Dokumen LKjIP Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024

Table 13 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain

Adapun Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sebulu dengan kecamatan Kembang Janggut dapat disajikan dalam grafik dibawah ini

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2024 :

Gambar 4
Grafik Perbandingan realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain



Berdasarkan Hasil Analisis

Gambar 4 - Grafik Perbandingan realisasi Kinerja dengan Kecamatan Lain

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Sebulu sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021 - 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	87.75	87	100.86
2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindak Lanjuti	39	40	97.50
		Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	64	65	98.46
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	45	45	100.00

Table 14 - Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Sebulu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator Kinerja				Anggaran		Tingkat Efisiensi
		Uraian Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	71.54	89.43	7,756,833,495	6,010,514,992	Efisien
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan sesuai SOP	41	100	243.90	28,187,751,040	26,083,715,183	Efisien
		Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	90	100	111.11			
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100	100	100.00	524,069,150	508,941,654	Efisien
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	100	100	100	101,901,920	93,250,300	Efisien

No	Program	Indikator Kinerja				Anggaran		Tingkat Efisiensi
		Uraian Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
		dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan						
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100	323,628,200	320,771,580	Efisien

Hasil Analisis

Table 15 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tahun 2025 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 80 nilai dan capaian realisasi kinerja program 71.54 Kategori BB interpretasi **Sangat Baik** berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator kinerja ke - 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 yaitu Presentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang Dilaksanakan sesuai SOP dengan target sebesar 41 persen realisasi kinerja program 100 persen. Persentase capaian Program 243,90 Persen, Faktor pendukung Alokasi Anggaran dan Kapasitas SDM dan tidak ada kendala kegiatan berjalan sesuai rencana diharapkan lebih meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan pihak terkait.

Indikator Kinerja ke -2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun 2025 yaitu Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan dengan target sebesar 90 persen. Persentase realisasi fisik 100 persen, persentase capaian 111,11 faktor pendukung ketersediaan anggaran dan pelaksanaan sesuai rencana. Diharapkan lebih meningkat koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan Tahun 2025 yaitu Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dengan target kinerja sebesar 100 persen dan realisasi kinerja program 100 persen, persentase capaian kinerja program 100 persen. Target kinerja tercapai, Faktor pendukung adanya anggaran kegiatan dan kegiatan berjalan sesuai rencana, diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 yaitu persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan target sebesar 100, realisasi kinerja program 100, persentase capaian kinerja program 100 persen Target kinerja tercapai, Faktor pendukung adanya anggaran kegiatan dan kegiatan berjalan sesuai rencana diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 yaitu Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target kinerja sebesar 100 persen dan realisasi kinerja program 100 persen. Persentase capaian kinerja program 100 persen target kinerja tercapai, Faktor pendukung adanya anggaran kegiatan dan kegiatan berjalan sesuai rencana diharapkan lebih aktif dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Tabel 16
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	99.38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89.43	Menunjang
	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindak Lanjuti	100.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
		Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	Menunjang
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kewenangan Kecamatan	100.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang di administrasikan	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	66.67	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan sesuai SOP	243.9	Menunjang
					Tingkat Aksebilitas Wilayah Kecamatan	111.11	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	100	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	100	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Berdayakan	100	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	100	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
					Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	100	Menunjang

Table 16 - Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89.49 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Sebulu	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan yang di tindak Lanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	7,756,833,495.00	6,010,514,992.00	77.49	1,746,318,503.00
		Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261,461,921.00	173,518,949.00	66.36	87,942,972.00
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kewenangan Kecamatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64,024,800.00	60,290,280.00	94.17	3,734,520.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2,420,021.00	2,410,000.00	99.59	10,021.00
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2,475,210.00	2,416,500.00	97.63	58,710.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	34,267,840.00	23,827,300.00	69.53	10,440,540.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,375,150.00	19,315,129.00	73.23	7,060,021.00
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	119,505,500.00	58,129,740.00	48.64	61,375,760.00
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,393,400.00	7,130,000.00	57.53	5,263,400.00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,636,982,513.00	4,716,812,891.00	83.68	920,169,622.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,525,653,613.00	4,619,427,891.00	83.60	906,225,722.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	87,240,000.00	87,240,000.00	100.00	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,688,300.00	3,285,000.00	28.11	8,403,300.00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12,400,600.00	6,860,000.00	55.32	5,540,600.00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80,471,600.00	60,696,956.00	75.43	19,774,644.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59,881,600.00	41,496,956.00	69.30	18,384,644.00
			Rekonsiliasi an Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,590,000.00	19,200,000.00	93.25	1,390,000.00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	207,318,859.00	202,129,630.00	97.50	5,189,229.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73,646,259.00	72,410,350.00	98.32	1,235,909.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,700,000.00	17,077,000.00	96.48	623,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,824,800.00	4,730,000.00	98.04	94,800.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103,773,000.00	102,130,280.00	98.42	1,642,720.00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7,374,800.00	5,782,000.00	78.40	1,592,800.00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	771,073,388.00	147,766,003.00	19.16	623,307,385.00
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196,005,000.00	114,000,003.00	58.16	82,004,997.00
			Pengadaan Mebel	35,068,388.00	33,766,000.00	96.29	1,302,388.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540,000,000.00	-	-	540,000,000.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643,305,214.00	566,348,914.00	88.04	76,956,300.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000.00	2,197,000.00	99.86	3,000.00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	4,950,000.00	99.00	50,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	501,795,010.00	445,639,284.00	88.81	56,155,726.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134,310,204.00	113,562,630.00	84.55	20,747,574.00
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	146,220,000.00	133,241,649.00	91.12	12,978,351.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132,700,000.00	119,851,649.00	90.32	12,848,351.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,520,000.00	13,390,000.00	99.04	130,000.00
2	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28,187,751,040.00	26,083,715,183.00	92.54	2,104,035,857.00
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	339,075,500.00	331,145,021.00	97.66	7,930,479.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Pemerintah di Tingkat Kecamatan				
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	112,706,000.00	105,109,118.00	93.26	7,596,882.00
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	226,369,500.00	226,035,903.00	99.85	333,597.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60,407,300.00	58,854,970.00	97.43	1,552,330.00
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60,407,300.00	58,854,970.00	97.43	1,552,330.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	27,788,268,240.00	25,693,715,192.00	92.46	2,094,553,048.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	557,713,624.00	516,699,322.00	92.65	41,014,302.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan lain yang Dilimpahkan	27,230,554,616.00	25,177,015,870.00	92.46	2,053,538,746.00
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN	524,069,150.00	508,941,654.00	93.26	15,127,496.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa / Kelurahan	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	155,152,950.00	145,778,169.00	93.96	9,374,781.00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	125,531,950.00	121,948,169.00	97.15	3,583,781.00
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29,621,000.00	23,830,000.00	80.45	5,791,000.00
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	368,916,200.00	363,163,485.00	98.44	5,752,715.00
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	368,916,200.00	363,163,485.00	98.44	5,752,715.00
		persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101,901,920.00	93,250,300.00	91.51	8,651,620.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	101,901,920.00	93,250,300.00	91.51	8,651,620.00
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	101,901,920.00	93,250,300.00	91.51	8,651,620.00
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	323,628,200.00	320,771,580.00	99.12	2,856,620.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	323,628,200.00	320,771,580.00	99.12	2,856,620.00
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	323,628,200.00	320,771,580.00	99.12	2,856,620.00
	JUMLAH			36,894,183,805.00	33,017,193,709.00	89.49	3,876,990,096.00

Table 17 - Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2024) realisasi anggaran sebesar 94.61 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel Berikut ini :

Tabel 18
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2024)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sebulu	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sebulu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	7,552,672,390.00	6,729,402,056.00	89.10	823,270,334.00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143,000,000.00	118,540,380.00	82.90	24,459,620.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000.00	23,662,200.00	94.65	1,337,800.00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5,000,000.00	2,522,900.00	50.46	2,477,100.00
			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	5,000,000.00	4,645,000.00	92.90	355,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,816,000.00	96.32	184,000.00
			Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5,000,000.00	4,811,000.00	96.22	189,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,000,000.00	78,083,280.00	79.68	19,916,720.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,886,364,689.00	5,209,202,602.00	88.50	677,162,087.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,659,231,592.00	4,982,505,505.00	88.04	676,726,087.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85,500,000.00	85,220,000.00	99.67	280,000.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000.00	9,844,000.00	98.44	156,000.00
			Pelaksanaan Akuntansi SKPD	131,633,097.00	131,633,097.00	100.00	-
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00	-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107,000,000.00	89,075,729.00	83.25	17,924,271.00
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	107,000,000.00	89,075,729.00	83.25	17,924,271.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,560,000.00	216,436,544.00	94.70	12,123,456.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	29,964,000.00	99.88	36,000.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,500,000.00	12,480,000.00	99.84	20,000.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	4,922,000.00	98.44	78,000.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158,060,000.00	146,120,544.00	92.45	11,939,456.00
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000.00	14,950,000.00	99.67	50,000.00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130,000,000.00	113,400,000.00	87.23	16,600,000.00
			Pengadaan Mebel	90,000,000.00	78,700,000.00	87.44	11,300,000.00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	34,700,000.00	86.75	5,300,000.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	683,451,701.00	633,459,950.00	92.69	49,991,751.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00	-
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000.00	4,880,000.00	97.60	120,000.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	483,734,493.00	439,153,182.00	90.78	44,581,311.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192,517,208.00	187,226,768.00	97.25	5,290,440.00
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	340,696,000.00	315,686,851.00	92.66	25,009,149.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	170,000,000.00	160,546,846.00	94.44	9,453,154.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,520,000.00	8,350,000.00	98.00	170,000.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	162,176,000.00	146,790,005.00	90.51	15,385,995.00
2	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	21,863,962,000.00	21,109,111,179.00	96.55	754,850,821.00
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	14,880,000.00	99.20	120,000.00
			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15,000,000.00	14,880,000.00	99.20	120,000.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	-
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	21,843,962,000.00	21,089,231,179.00	96.54	754,730,821.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Nonperizinan	871,602,000.00	846,338,265.00	97.10	25,263,735.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Kewenangan lain yang Dilimpahkan	20,972,360,000.00	20,242,892,914.00	96.52	729,467,086.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	310,000,000.00	303,002,498.00	99.20	6,997,502.00
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	310,000,000.00	303,002,498.00	97.74	6,997,502.00
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	-
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300,000,000.00	293,002,498.00	97.67	6,997,502.00
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	438,400,000.00	395,565,000.00	90.23	42,835,000.00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	438,400,000.00	395,565,000.00	90.23	42,835,000.00
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	413,400,000.00	372,419,000.00	90.09	40,981,000.00
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25,000,000.00	23,146,000.00	92.58	1,854,000.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	226,000,000.00	217,173,000.00	96.09	8,827,000.00
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	226,000,000.00	217,173,000.00	96.09	8,827,000.00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25,000,000.00	18,370,000.00	73.48	6,630,000.00
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	201,000,000.00	198,803,000.00	98.91	2,197,000.00
	JUMLAH			30,391,034,390.00	28,754,253,733.00	94.61	1,636,780,657.00

Table 18 - Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Dengan demikian pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 36.894.183.805,00 dan pada Tahun 2024 Pagu Anggaran sebesar Rp 30.391.034.390,00 terjadi penambahan Anggaran di bandingkan tahun 2024 sebesar Rp 6.503.149.415,00

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 Kecamatan Sebulu secara umum telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dari 11 target sasaran strategis seluruhnya rata – rata masuk dalam kategori sangat tinggi dengan rata – rata capaian indikator kinerja 100 persen, Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti 100% dari target 39% dengan realiasi 39% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 2) Capaian kinerja Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% dari target 64% dengan realisasi 64% kriteria penilaian sangat baik.
- 3) Capaian kinerja Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa 100% dari target 45% dengan realisasi 45% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 4) Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) 100% dari target 100% dengan realisasi 100% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 5) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 99,38% dari target 88,30% dengan realisasi 87,75% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 6) Capaian kinerja Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD tahun sebelumnya 100% dari target 100% dengan realisasi 100% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 7) Capaian kinerja Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah 100% dari target level 3 dengan realisasi level 3 kriteria penilaian sangat tinggi.
- 8) Capaian kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah 100% dari target 1 inovasi dengan realisasi 1 inovasi kriteria penilaian sangat tinggi.
- 9) Capaian kinerja Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor 100% dari target 100% dengan realisasi 100% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 10) Capaian kinerja Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia 100% dari target 100% dengan realisasi 100% kriteria penilaian sangat tinggi.
- 11). Capaian kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" 100% dari target 48 Laporan dengan realisasi 48 Laporan kriteria penilaian sangat tinggi.

- 12) Capaian kinerja Nilai SAKIP Kabupaten 82,61% dari target 77 Nilai dengan realisasi 65,92 nilai kriteria penilaian tinggi.
- 13) Capaian kinerja Indeks RB Kabupaten 110,02% dari target 65 Nilai dengan realisasi 71,51 nilai kriteria penilaian sangat tinggi.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya Kerangka Acuan Kerja yang terarah dan terukur pada setiap bidang
- 2) Perlunya komunikasi dan Koordinasi untuk pencapaian Tujuan Organisasi
- 3) Perlunya Pemahaman dan Pelaksanaan yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan atas Kinerja oleh masing-masing bidang sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Tupoksi .
- 4) Perlunya Pembinaan, Arahan untuk memperkuat kinerja Organisasi, khususnya Kecamatan Sebulu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sebulu Tahun 2025, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sebulu, 20 Februari 2025

Camat Sebulu

Edy Fahrudin, SE., MM

Nip. 19761101 200112 1 004





LAMPIRAN - LAMPIRAN,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EDY FAHRUDDIN, SE, MM**

Jabatan : **CAMAT SEBULU**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan pada perangkat daerah yang saya pimpin.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
3. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

4. Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
8. Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
9. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;

12 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan Sanksi

Pihak pertama dalam hal ini menyatakan bersedia mundur dan /atau dimundurkan dari jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 07 Nopember 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Kartanegara



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama
Camat



EDY FAHRUDDIN, SE., MM
NIP. 19761101 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	39
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	64
2.	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
4.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
5.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
6.	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
7.	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
8.	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
9.	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
10.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
11.	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.7.756.833.495	APBD-P
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.28.187.751.040	APBD-P
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.524.069.150	APBD-P
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.323.628.200	APBD-P
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.101.901.920	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		Rp.36.894.183.805	

Kutai Kartanegara, 07 November 2025

Pihak Kedua

Bupati Kutai Kartanegara



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes

Pihak Pertama

Camat



EDY FAHRUDDIN, SE.,MM
NIP. 19761101 200112 1 004

GAMBARAN UMUM

KONDISI GEOGRAFIS

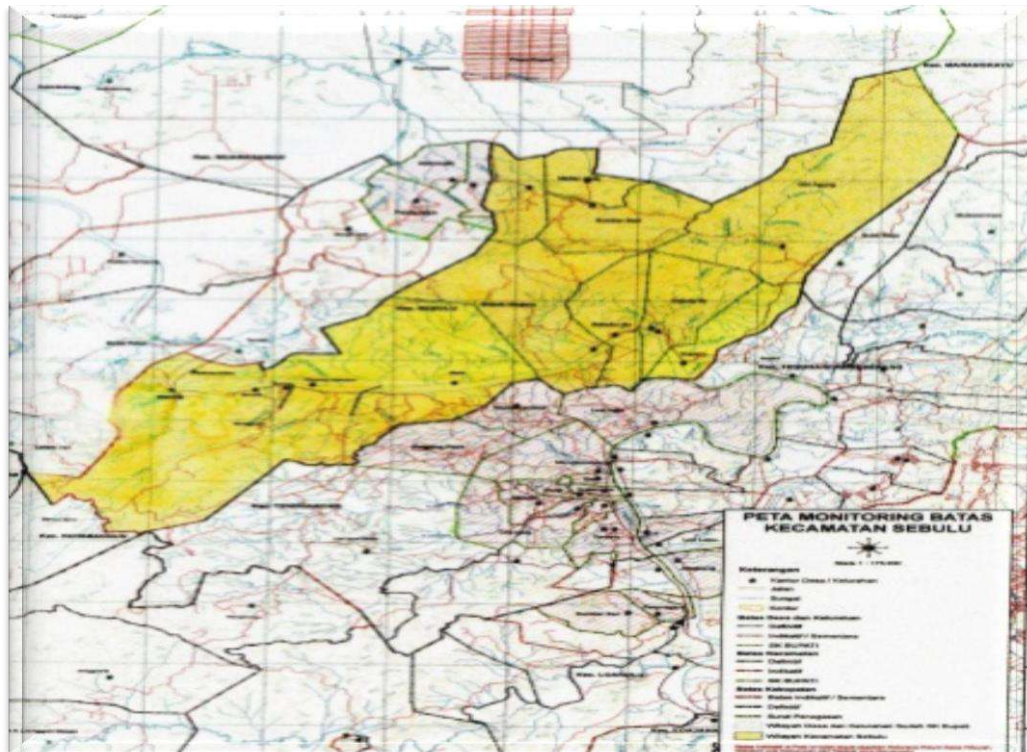
Secara luas wilayah, Kecamatan Sebulu memiliki wilayah seluas 859.50 km² atau 3.15 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2010 wilayahnya terdiri dari atas tiga belas(13) desa yaitu : Selerong, Tanjung Harapan, Beloro, desa Sebulu Ulu, Manunggal Daya, Sumber Sari, Sebulu Ilir, Segihan, Giri agung, Senoni, Sebulu Modern, Lekaq Kidau dan Sanggulan. Pada tahun 2011 jumlah desa di Kecamatan Sebulu bertambah menjadi 14 desa, karena desa Sumber Sari mengalami pemecahan menjadi desa Sumber Sari dan desa Mekar Jaya.

Letak kantor Camat Sebulu berada di desa Sebulu Ilir. Desa yang paling jauh dari kantor Camat adalah desa Lekaq Kidau (berjarak 42 Km) dan jalan yang dilalui berupa sungai dan jalan darat.

Gambar 5

PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SEBULU



Sumber Data dari bidang Pemerintahan Kecamatan Sebulu

Gambar 5 - PETA ADMINISTRASI KECAMATAN SEBULU

1. Hari Jadi Kecamatan Sebulu

**KECAMATAN SEBULU BERDIRI PADA
HARI JUM'AT, 12 MEI 1965**

2. Titik Koordinat Kecamatan Sebulu

KONDISI GEOGRAFI KECAMATAN SEBULU
Wilayah Kecamatan Sebulu terletak di daerah Katulistiwa berada pada posisi 116°
– $39'$ BT dan $0^{\circ}3'$ – $0^{\circ}33'$ LS , dengan luas wilayah 59.968.31 Ha

3. Batas – Batas Wilayah Kecamatan Sebulu

Secara Administrasi Kecamatan Sebulu berbatasan dengan :

SEBELAH UTARA	:	KECAMATAN MARANG KAYU
---------------	---	-----------------------

SEBELAH TIMUR	:	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
---------------	---	----------------------------------

SEBELAH SELATAN	:	KECAMATAN KOTA BANGUN
-----------------	---	-----------------------

SEBELAH BARAT	:	KECAMATAN MUARA KAMAN
---------------	---	-----------------------

4. Kepadatan Penduduk Kecamatan Sebulu

KEPADATAN PENDUDUK KECAMATAN SEBULU

**Rata – Rata Kepadatan Penduduk di Kecamatan Sebulu Sekitar 46
Jiwa Km² atau 14 Rumah Tangga Km².**

5. Topografi dan Curah Hujan Kecamatan Sebulu

**Derajat Kelerengan / Kemiringan 5 – 30 %
Curah Hujan Rata – rata 1.949 mm / Tahun**

Jumlah Hari Hujan Rata – Rata 132 Hari / Tahun (10 Hari /Bulan)

6. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kecamatan Kecamatan Sebulu

Tabel 19
Monografi Kecamatan Sebulu Terhitung Juni 2025

No.	Nama Desa	JUMLAH PENDUDUK AKHIR BULAN JUNI TAHUN 2025				Jumlah Dusun	Jumlah RT	Luas Wilayah (ha)
		L	P	Jumlah Jiwa	Jumlah KK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Selerong	897	782	1.682	694	2	11	5.343,68
2	Tanjung harapan	702	671	1.373	411	2	9	6.062,29
3	Beloro	1.417	1.239	2.656	807	1	12	7.444,36
4	Sebulu Ulu	2.337	2.222	4.559	1.369		15	2.858,27
5	Sebulu Ilir	1.488	1.383	2.871	936		16	3.216,13
6	Segihan	1.382	1.176	2.558	816	3	11	2.672,99
7	Sumber Sari	3.059	2.868	5.927	1.713	4	24	3.382,00
8	Manunggal Daya	2.588	2.405	4.993	1.499	5	26	2.061,00
9	Giri Agung	1.387	1.216	2.603	797	2	16	11.580,12
10	Senoni	1.091	944	2.035	574	3	17	2.536,64
11	Sebulu Modern	2.126	2.058	4.184	1.194	2	15	6.267,78
12	Sanggulan	1.401	1.264	2.665	803	2	20	4.910,70
13	Leka Kidau	248	215	463	138		5	189,51
14	Mekar Jaya	1.477	1.347	2.824	744	2	12	1.442,84
	Jumlah	21.600	19.790	41.393	12.495	28	209	59.968,31

Sumber Data dari Bidang Pemerintahan Kecamatan Sebulu Per Juni 2025

Table 19 - Monografi Kecamatan Sebulu Terhitung Juni 2025

7. JARAK DARI DESA KE KECAMATAN, KABUPATEN, PROPINSI (ORBITASI)

TABEL 20

NO	NAMA DESA	KECAMATAN (Km)	KABUPATEN (Km)	PROVINSI (Km)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SELERONG	37	57	70	JALUR DARAT DAN SUNGAI
2.	TANJUNG HARAPAN	15	35	63	JALUR DARAT DAN SUNGAI
3.	BELORO	13	33	60	JALUR DARAT DAN SUNGAI
4.	SEBULU ULU	3	23	56	JALUR DARAT DAN SUNGAI
5.	SEBULU ILIR	1	24	57	JALUR DARAT DAN SUNGAI

NO	NAMA DESA	KECAMATAN (Km)	KABUPATEN (Km)	PROVINSI (Km)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6.	SEGIHAN	4	28	60	JALUR DARAT DAN SUNGAI
7.	SUMBER SARI	14	34	60	JALUR DARAT
8.	MANUNGGAL DAYA	18	38	64	JALUR DARAT
9.	GIRI AGUNG	20	40	62	JALUR DARAT
10.	SENONI	30	50	67	JALUR DARAT DAN SUNGAI
11.	SEBULU MODERN	4	21	45	JALUR DARAT DAN SUNGAI
12.	SANGGULAN	28	48	65	JALUR DARAT DAN SUNGAI
13.	LEKAQ KIDAU	40	60	72	JALUR DARAT DAN SUNGAI
14.	MEKAR JAYA	14	34	61	JALUR DARAT

Sumber dari bagian PMD per Juni 2025

Table 20 - Jarak Dari Desa Ke Kecamatan, Kabupaten, Propinsi

8. Sarana dan Prasarana Kantor Camat Sebulu

Kemajuan teknologi membawa konsekwensi dengan tuntutan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, bilamana sarana dan prasarana tidak dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan disegala momentum. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di kantor Camat Sebulu kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

. TABEL 21
SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN SEBULU

NO	RUANGAN	KEADAAN	JUMLAH (UNIT)
1	2	3	4
1	Ruang / Gedung Camat	BAIK	1
2	Ruang Sekretaris Kecamatan	BAIK	1
3	Ruang Kasi Pemerintahan	BAIK	1
4	Ruang Kasi KESRA	BAIK	1
5	Ruang Kasi TRANTIB	BAIK	1

NO	RUANGAN	KEADAAN	JUMLAH (UNIT)
6	Ruang Kasi PMD	BAIK	1
7	Ruang Kasi Pelayanan Umum	BAIK	1
8	Ruang Kasi Umum dan Kepegawaian	BAIK	1
9	Ruang Kasubag Program & Keuangan	BAIK	1
10	Ruang Bendahara	BAIK	1
11	Ruang Perpustakaan	BAIK	1
12	Ruang Dapur	BAIK	1
13	Toilet	BAIK	2
14	Gedung Sekretariat PKK	BAIK	1
15	Toilet Luar	RUSAK RINGAN	3
16	Musholla	RUSAK RINGAN	1
17	Gedung Arsip	RUSAK RINGAN	1
18	BPU	RUSAK RINGAN	1
19	BPU	RUSAK BERAT	1
20	Rumah Dinas Camat	RUSAK RINGAN	1
21	Rumah Dinas Staf	RUSAK RINGAN	5
22	Rumah Dinas Staf	RUSAK BERAT	3
23	Gedung PATEN	RUSAK RINGAN	1

Sumber Data : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian bagian Aset Kecamatan Sebulu Juni 2025

Table 21 - SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN SEBULU

TABEL 22
ASET KECAMATAN SEBULU

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah Aset	Kondisi	Keterangan
1	Aset tetap Tanah	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	Baik	
2	Aset tetap Tanah	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Baik	
3	Aset tetap Tanah	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	2	Baik	
4	Aset tetap Tanah	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Baik	
5	Aset tetap Tanah	Tanah Untuk Makam Muslim	1	Baik	
Jumlah Kib A			12		
6	Aset tetap peralatan dan mesin	Dump Truck	1	Baik	
7	Aset tetap peralatan dan mesin	Nozzle Kuningan Pernekel	2	Baik	
8	Aset tetap peralatan dan mesin	P.C Unit	31	Baik	
9	Aset tetap peralatan dan mesin	Laptop	15	Baik	
10	Aset tetap peralatan dan mesin	Notebook	12	Baik	
11	Aset tetap peralatan dan mesin	Hard Disk	9	Baik	
12	Aset tetap peralatan dan mesin	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	Baik	
13	Aset tetap peralatan dan mesin	Baju Anti Panas	3	Baik	
14	Aset tetap peralatan dan mesin	Selang Power Inflator Tekanan Rendah	5	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah Aset	Kondisi	Keterangan
15	Aset tetap peralatan dan mesin	Selang Tekanan Tinggi	2	Baik	
16	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Station Wagon</i>	4	Baik	
17	Aset tetap peralatan dan mesin	Sepeda Motor	13	Baik	
18	Aset tetap peralatan dan mesin	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	Baik	
19	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Penyimpan	1	Baik	
20	Aset tetap peralatan dan mesin	Mesin Ketik Manual <i>Langewagon (18-27 Inchi)</i>	1	Baik	
21	Aset tetap peralatan dan mesin	Mesin Fotocopy Lainnya	1	Baik	
22	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Besi/Metal	11	Baik	
23	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Kayu	2	Baik	
24	Aset tetap peralatan dan mesin	Rak Besi	10	Baik	
25	Aset tetap peralatan dan mesin	Filing Cabinet Besi	12	Baik	
26	Aset tetap peralatan dan mesin	Brankas	2	Baik	
27	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Kaca	5	Baik	
28	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>CCTV - Camera Control Television System</i>	1	Baik	
29	Aset tetap peralatan dan mesin	Alat Penghancur Kertas	3	Baik	
30	Aset tetap peralatan dan mesin	Papan Nama Instansi	1	Baik	
31	Aset tetap peralatan dan mesin	Alat Kantor Lainnya	4	Baik	
32	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Kerja Kayu	3	Baik	
33	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Rapat	5	Baik	
34	Aset tetap peralatan dan mesin	Tempat Tidur Kayu	2	Baik	
35	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Makan Besi	1	Baik	
36	Aset tetap peralatan dan mesin	Kursi Tamu	3	Baik	
37	Aset tetap peralatan dan mesin	Bangku Tunggu	5	Baik	
38	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Komputer	1	Baik	
39	Aset tetap peralatan dan mesin	Sofa	4	Baik	
40	Aset tetap peralatan dan mesin	Meubelair lainnya	6	Baik	
41	Aset tetap peralatan dan mesin	Alat Pembersih lainnya	10	Baik	
42	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Es	4	Baik	
43	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>A.C. Window</i>	9	Baik	
44	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>A.C. Split</i>	12	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah Aset	Kondisi	Keterangan
45	Aset tetap peralatan dan mesin	Kipas Angin	10	Baik	
46	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Rice Cooker (Alat Dapur)</i>	1	Baik	
47	Aset tetap peralatan dan mesin	Televisi	2	Baik	
48	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Loudspeaker</i>	2	Baik	
49	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Sound System</i>	3	Baik	
50	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Wireless</i>	1	Baik	
51	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Camera film</i>	1	Baik	
52	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Dispenser</i>	13	Baik	
53	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Handycam</i>	1	Baik	
54	Aset tetap peralatan dan mesin	Karpet	5	Baik	
55	Aset tetap peralatan dan mesin	Alat Pemadam/Portable	18	Baik	
56	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Kerja Pejabat Eselon II	7	Baik	
57	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
58	Aset tetap peralatan dan mesin	Meja Kerja Pejabat lain-lain	31	Baik	
59	Aset tetap peralatan dan mesin	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik	
60	Aset tetap peralatan dan mesin	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12	Baik	
61	Aset tetap peralatan dan mesin	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Baik	
62	Aset tetap peralatan dan mesin	Kursi Tamu di Ruang Tunggu Pejabat Eselon I	6	Baik	
63	Aset tetap peralatan dan mesin	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Baik	
64	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Audio Monitor Active</i>	1	Baik	
65	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	3	Baik	
66	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Camera Electronic</i>	1	Baik	
67	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Digital Video Effect</i>	1	Baik	
68	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Film Projector</i>	1	Baik	
69	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Camera Viewfinder</i>	2	Baik	
70	Aset tetap peralatan dan mesin	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Baik	
71	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Unit Tranceiver HF Portable</i>	7	Baik	
72	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Unit Tranceiver HF Transportable</i>	2	Baik	
73	Aset tetap peralatan dan mesin	<i>Engine Running In Tester</i>	1	Baik	

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah Aset	Kondisi	Keterangan
74	Aset tetap peralatan dan mesin	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	Baik	
75	Aset tetap peralatan dan mesin	Nozzlemeter Flowmeter	2	Baik	
76	Aset tetap peralatan dan mesin	Serial Scanner/ Printer	2	Baik	
77	Aset tetap peralatan dan mesin	LCD Projector/ Infocus	2	Baik	
Jumlah Kib B			407		
78	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik	
79	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2	Baik	
80	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3	Baik	
81	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Baik	
82	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Posyandu	1	Baik	
83	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	Baik	
84	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Permanen	1	Baik	
85	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	Baik	
86	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik	
87	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	2	Baik	
88	Aset tetap gedung dan bangunan	Bangunan Tempat Parkir	1	Baik	
89	Aset tetap gedung dan bangunan	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Baik	
90	Aset tetap gedung dan bangunan	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	Baik	
91	Aset tetap gedung dan bangunan	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	8	Baik	
92	Aset tetap gedung dan bangunan	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	1	Baik	
Jumlah Kib C			26		
93	Aset tetap jalan dan jaringan	Jalan Desa	31	Baik	
94	Aset tetap jalan dan jaringan	Jalan Desa Lain-lain	9	Baik	
95	Aset tetap jalan dan jaringan	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1	Baik	
96	Aset tetap jalan dan jaringan	Saluran Sekunder Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	3	Baik	
97	Aset tetap jalan dan jaringan	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	2	Baik	
98	Aset tetap jalan dan jaringan	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	1	Baik	
99	Aset tetap jalan dan jaringan	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Baik	
Jumlah Kib D			48		

Sumber Data : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian bagian Aset Kecamatan Sebulu Juni 2025

Table 22 - ASET KECAMATAN SEBULU

TABEL 23
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN (PATEN) KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PEMOHON PENERIMA PELAYANAN JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025												JUMLAH TAHUN 2025	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Perbulan														
1	Pembuatan Kartu Tanda Penduduk/KTP	95	95	54	111	67	72	103	97	111	94	125	148	1172	Kasi Pemerintahan
2	Pembuatan Kartu Keluarga / KK	26	43	26	30	21	26	39	50	31	31	58	40	421	Kasi Pemerintahan
3	Perbaikan Kartu Tanda Penduduk / KTP														
4	Perbaikan Kartu Keluarga / KK														
5	Mengambil Kartu Tanda Penduduk/KTP														
6	Mengambil Kartu Keluarga / KK														
7	Mengambil Surat Pindah	10	6	6		2	16	15	7	10	7	14	12	105	Kasi Pemerintahan
8	Mengambil Akte Kelahiran														
9	Surat Keterangan Belum Cukup Umur														
10	Surat Keterangan Domisili														
11	Surat Keterangan Izin Pemakaman													0	Kasi Pemerintahan
12	Surat Keterangan Ahli Waris	6	9	6	3	5	4	6	9	6	8	11	21	94	Kasi Pemerintahan
13	Rekomendasi Proposal Rumah Ibadah								1						
14	Rekomendasi Pondok				1										
15	Rekomendasi Yasinan														
16	Pembuatan AK 1	13	13	6	15	33	30	17	8	15	3	10	4	167	Kasi Kesra
17	Surat Dispensasi Nikah	7	10	3	8	4	6	6	9	6	14	8	7	88	Kasi Kesra
18	Rekomendasi Menara Masjid										1	1			Kasi Trabtib

No	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PEMOHON PENERIMA PELAYANAN												JUMLAH TAHUN 2025	KET
		JANUARI s/d DESEMBER TAHUN 2025													
	Perbulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM	50	30	1	4	13	18	162	7	22	20	1	1	329	Kasi Kesra
20	Legalisir KTP														
21	Legalisir KK														
22	Pembuatan N I B	1	3	4	1	1	1	1	1	3				16	Kasi Pelayanan Umum
23	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)														
24	Pembuatan Pengantar SKCK	46	36	23	44	105	74	62	32	55	28	30	11	546	Kasi Trantib
25	Pembuatan HO /Hinder Ordonatie														
26	Perpanjangan HO /Hinder Ordonatie														
27	Izin Keramaian						1							1	Kasi Trantib
28	Rekom Galian C														
29	Domisili Kelompok Tani Peternakan		9	1								2			
30	Rekomendasi Proposal Pertanian/Perkebunan	3	4		2	1	1	1	2	3	2	2	1	22	Kasi PMD
31	Rekomendasi Bantuan Kelompok Perikanan	3	1	3	1	1	1	2	1	1	3	2	1	20	Kasi PMD
32	Rekomendasi BTL	2												2	Kasi PMD
33	Rekomendasi UMKM					1	3					2		6	Kasi PMD
34	Rekomendasi Permohonan Saran Prasarana		1		1			2						4	Kasi PMD
	Jumlah Pelayanan per Bulan	262	260	133	221	254	253	416	224	263	211	266	246	3,009	

Sumber Data dari Bidang Pelayanan Umum Per Desember 2025

Table 23 - CAPAIAN KINERJA PELAYANAN (PATEN) KECAMATAN SEBULU TAHUN 2025

Tabel 24
Rasio Pencapaian Target Kinerja

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kecamatan	Nilai	83	84	85	86	87	83,43	84,48	90,71	87,75	-	100,52	100,57	106,72	102	-
2	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	33	35	37	39	40	100	100	100	39	-	303,03	285,71	270,27	100	-
3	Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Nilai	30	35	40	45	45	30	35	40	45	-	100	100	100	100	-
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	80	80	80	80	88,3	64,64	71,51	-	-	126,14	80,8	89,38	-	-
01.01	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	100	100	100	100	-
1'1'1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100	-
1'1'2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
1'1'3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
1'1'4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1'1'5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-
1'1'6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	100	100	100	100	-
1'1'7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	100	-
1'1'8	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	100	-
1'1'9	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	100	-
01.02	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	100	100	100	100	-
01.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	574	574	574	574	574	574	574	574	574	-	100	100	100	100	-
01.02.02	Jumlah laporan Akuntansi SKPD	Laporan	na	1	NA	NA	NA	na	1	1	NA	-	na	100	na	NA	na
01.02.03	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi																
01.02.04	Jumlah Bulan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
01.02.05	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	100	NA
01.03	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	NA	694	695	695	696	693	694	695	695	-	NA	100	100	100	-
01.03.02	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Unit	na	na	na	10	NA	na	na	na	10	NA	NA	na	na	100	-
01.03.04	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	NA	100	100	100	-
01.04	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	NA	82	83	85	86	81	82	82	10	-	NA	100	98,795	12	-
01.04.01	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	stel	na	NA	41	na	na	na	41	na	NA	-	na	na	0	NA	-
01.04.02	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	na	3	na	na	na	na	3	na	NA	-	na	na	100	NA	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
01.04.03	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	na	4	4	4	4	na	na	4	4	-	na	0	100	100	-
01.05	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persen	88	89	90	91	92	87	88	89	91	-	98,864	98,876	98,889	100	-
01.05.01	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Unit	NA	4	NA	NA	NA	NA	4	NA	NA	-	NA	100	NA	NA	NA
01.05.02	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	100	100	100	100	-
01.05.03	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	100	100	100	100	-
01.05.04	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Lembar	4960	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	-	90,726	90,726	100	100	-
01.05.05	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	Kali	na	na	200	na	na	na	na	1	NA	-	NA	NA	0,5	NA	NA
01.05.06	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	100	100	100	100	-
01.05.07	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	100	100	100	100	-
01.06	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	6	4	1	-	100	600	400	100	-
01.06.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	1	5	NA	2	NA	1	5	NA	3	-	100	100	NA	150	na

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan																
01.06.02	Jumlah Mebel Yang Diadakan	Unit	NA	4	2	2	NA	NA	4	2	3	-	NA	0	0	150	-
01.06.03	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Unit	NA	10	2	NA	NA	NA	21	3	NA	-	NA	0	0	NA	-
01.06.04	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	Unit	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	na
01.07	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
01.07.01	Jumlah surat menyurat	Lembar	200	200	200	200	200	200	200	200	200	-	100	100	100	100	-
01.07.02	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	132	132	132	132	132	132	132	132	132	-	100	100	100	100	-
01.07.03	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	NA	12	12	12	12	NA	12	12	6	-	0	100	100	50	-
01.07.04	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang/Bulan	120	120	120	120	NA	120	120	120	93	-	100	100	100	78	-
01.08	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	24	24	24	24	24	24	24	24	24	-	100	100	100	100	-
01.08.01	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
01.08.02	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	-
01.08.03	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	NA	3	1	NA	NA	NA	5	2	NA	NA	NA	0	0	NA	NA
2	Persentase pelayanan perijinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	40	41	41	41	41	40	50	60	41	-	100	121,95	146,34	100	
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	87	88	89	90	91	87	87,5	88	89	-	100	99,432	98,876	99	
02.01	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara Efektif	Kegiatan	5	5	5	5	5	3	3	3	5	-	60	60	60	100	-
02.01.01	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	100	-
02.01.02	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	1	-	100	100	100	20	-
02.02	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	5	5	5	5	5	5	5	5	NA	-	100	100	100	NA	-
02.02.01	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Kegiatan	5	5	5	NA	NA	5	5	5	NA	na	100	100	100	na	na

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi																
02.02.02	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	NA	NA	NA	1	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-
02.03	Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	kegiatan	42	42	42	42	42	42	42	42	2	-	100	100	100	5	-
02.03.01	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas	300	300	300	300	300	250	250	250	12	-	83,333	83,333	83,333	4	-
02.03.02	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Kegiatan	55	55	55	55	55	76	212	140	140	-	138,18	385,45	254,55	255	-
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
03.01	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa	Laporan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	-	100	100	100	100	-
03.01.01	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Orang	150	150	150	150	150	150	150	150	150	-	100	100	100	100	-
03.01.02	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4	4	2	-	100	100	100	50	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
03.02	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	lembaga	NA	NA	NA	NA	7	na	na	na	NA	-	NA	NA	NA	NA	-
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	NA	NA	NA	4	4	NA	NA	NA	2	-	NA	NA	NA	NA	-
4	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Persen	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	100	-	0	0	0	100	
04.01	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	kegiatan	NA	NA	NA	14	14	NA	NA	NA	14	-	NA	NA	NA	100	-
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	NA	NA	NA	na	1	NA	NA	NA	NA	-	NA	NA	NA	NA	-
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	NA	NA	NA	2	1	NA	NA	NA	1	-	NA	NA	NA	50	-
4	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
04.01	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	kegiatan	1	2	2	2	2	1	2	2	2	-	100	100	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
04.01.01	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	NA	65	65	65	65	NA	65	65	65	-	NA	100	100	100	-
04.01.02	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kegiatan	14	5	5	NA	5	5	5	5	NA	-	35,714	100	100	NA	-
5	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	40	50	60	NA	80	100	100	100	NA	-	250	200	166,67	NA	-
05.01	Jumlah Desa Yang dibina dan difasilitasi	Desa	14	14	14	na	14	14	14	14	NA	-	100	100	100	NA	-
05.01.01	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	14	14	14	NA	14	14	14	14	NA	-	100	100	100	NA	-
05.01.02	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	14	14	14	NA	14	14	14	14	NA	-	100	100	100	NA	-

Hasil Analisis

Table 24 - Rasio Pencapaian Target Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN : 2025
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Sebulu
GENERATE DATE : 2026-Jan-21 10:13:54

KODE	NAMA SASARAN	KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SATUAN	VOLUME TARGET	REALISASI FISIK	% CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan	1.1	- Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	39	39	100.00	1. Dukungan Pemimpin Keterangan: Dukungan pimpinan didorong oleh kesesuaian program dengan visi misi daerah, manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan data pendukung yang kuat, serta potensi keberlanjutan dan efisiensi pelaksanaan Target Kinerja tercapai karena keluhan masyarakat dapat ditangani dan diberikan arahan sebagaimana mestinya	1. Alokasi dan Kapasitas SDM Keterangan: Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan layanan. Sebagian SDM belum memiliki kemampuan teknis yang memadai, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pelayanan berbasis digital. Pelaksanaan program masih dihadapkan pada keterbatasan alokasi dan kapasitas SDM, baik dari sisi jumlah, distribusi tugas, maupun kompetensi teknis, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja dan kualitas pelayanan
		1.2	- Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	64	64	100.00	1. Pihak Eksternal Keterangan: Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Persentase capaian ketentraman dan ketertiban tercapai karena jumlah kasus yang ditangani sesuai dengan total kasus yang ada di kecamatan	1. Alokasi dan Kapasitas SDM Keterangan: Kurangnya fasilitasi dan peralatan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban
		1.3	- Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	45	45	100.00	1. Pihak Eksternal 2. Anggaran Keterangan: Kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, dan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha desa, Keberlanjutan anggaran yang menjamin kelangsungan dan pengembangan usaha desa Terjadi peningkatan berdasarkan hasil perhitungan persentase PADes menjadi 53,65% dari target 45%	1. Alokasi dan Kapasitas SDM Keterangan: Kemampuan dan keterampilan SDM masih rendah, Penempatan SDM tidak sesuai dengan keahlian, kurangnya pelatihan dan pendampingan, Motivasi kerja rendah karena insentif terbatas

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TAHUN : 2025
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Sebulu
GENERATE DATE : 2026-Jan-21 10:14:18

KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE BIDANG	NAMA BIDANG	SASARAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI	% KEUANGAN	NAMA INDIKATOR	SATUAN	VOLUME TARGET	REALISASI FISIK	% CAPAIAN FISIK	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01	KECAMATAN	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.756.833.495	5.363.190.507	69,14	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	71.54	89.43	1. Pihak Eksternal ket: LHE SAKIP dari Inspektorat	1. Tidak Ada Kendala ket: Pelaksanaan sesuai rencana
				Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.187.751.040	25.714.380.674	91,23	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	41	100	243.90	1. Alokasi dan Kapasitas SDM ket: SDM yang Berkualitas	1. Tidak Ada Kendala ket: Kegiatan Berjalan sesuai Rencana
										Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	90	100	111.11	1. Anggaran ket: Ketersediaan Anggaran	1. Tidak Ada Kendala ket: Pelaksanaan Sesuai Rencana

KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE BIDANG	NAMA BIDANG	SASARAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	PAGU	REALISASI	% KEUANGAN	NAMA INDIKATOR	SATUAN	VOLUME TARGET	REALISASI FISIK	% CAPAIAN FISIK	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
				Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	524.069.150	315.542.969	60,21	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	100.00	1. Anggaran ket: Adanya Anggaran Kegiatan	1. Tidak Ada Kendala ket: Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana
				Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	101.901.920	64.965.300	63,75	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100.00	1. Anggaran ket: Adanya anggaran Kegiatan	1. Tidak Ada Kendala ket: Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana
				Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik Kecamatan Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	323.628.200	280.529.390	86,68	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	100.00	1. Anggaran ket: Tersedianya Anggaran Kegiatan	1. Tidak Ada Kendala ket: Kegiatan Berjalan Sesuai Rencana